

# PILIHAN STRATEGI PENGURANGAN KEMISKINAN DI SEKITAR HUTAN: STUDI KASUS DI KALIMANTAN TIMUR<sup>1)</sup> (*Poverty decreasing strategy options nearby forest: Cases study in East Kalimantan*)

Oleh / By :  
Agus Justianto<sup>2)</sup>

## ABSTRACT

*Poverty is still the main problem in Indonesia, especially for the people who live nearby forest. Eventhough some forest regulation has been implemented to alleviate that problem, but impact for their income was not significant. The case study was done in East Kalimantan by using Qualitative analysis and the result mainly related to policies for increasing income for the people who live nearby forest in the future. Those policies deal with activities such as : 1) Forest area management; 2) Forest industry; 3) Fiscal instrument; 4) Empowerment of rural institution; and 5) Infrastructure development.*

*Keywords : Poverty, people nearby forest, policy*

## ABSTRAK

Kemiskinan masih menjadi masalah di Indonesia terutama masyarakat yang ada di dalam dan sekitar hutan. Meskipun berbagai kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan telah diimplementasikan selama ini, namun belum sepenuhnya mampu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat sekitar hutan. Studi kasus di Propinsi Kalimantan Timur menggunakan analisis kuantitatif dan menghasilkan informasi bahwa pada masa mendatang perlu dikembangkan pilihan-pilihan kebijakan kehutanan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai kegiatan : 1) Pengelolaan kawasan hutan; 2) Industri kehutanan; 3) Pemberdayaan fiskal; 4) Penguatan kelembagaan; dan 5) Pembangunan infrastruktur.

Kata kunci : Kemiskinan, masyarakat sekitar hutan, kebijakan

## I. PENDAHULUAN

Pemanfaatan sumber daya hutan selama ini, ternyata tidak dinikmati secara proporsional oleh semua kelompok masyarakat. Kepentingan dan hak masyarakat yang berada di dalam dan sekitar hutan sering terabaikan, termasuk aksesnya terhadap manfaat hutan, sehingga memberikan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat tersebut. Hal ini menyebabkan kemiskinan tetap menjadi masalah di Indonesia walaupun pemanfaatan sumber daya alam termasuk hutan telah berlangsung lama.

---

<sup>1)</sup> Disarikan dari Disertasi berjudul "Dampak Kebijakan Pembangunan Kehutanan terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin di Kalimantan Timur: Suatu Pendekatan Sistem Neraca Sosial Ekonomi" oleh Agus Justianto, Pascasarjana IPB, 2005

<sup>2)</sup> Penulis bekerja sebagai PNS Dephut yang diperbantukan sebagai Co-Director of Forest Governance and Multistakeholder Forestry Programme-DFID

Sebagai provinsi yang sedang membangun, Kalimantan Timur membutuhkan aliran pendapatan yang berkesinambungan agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Selama tiga dekade belakangan ini, sumberdaya hutan telah memberikan kontribusi yang relatif signifikan dalam pembangunan nasional, karena sumberdaya hutan merupakan salah satu kekayaan alam (*natural capital*) yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan aliran pendapatan baik untuk daerah maupun masyarakat. Kebijakan pemanfaatan hutan alam telah berhasil meningkatkan devisa, penyerapan tenaga kerja dan nilai tambah serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. (Astana dan Erwidodo, 2001). Namun dibalik keberhasilannya, dampak kebijakan yang diterapkan membawa persoalan baru yang belum pernah dialami sebelumnya. Akhir-akhir ini, banyak pihak mulai mengkhawatirkan terjadinya penurunan potensi produksi hutan tersebut dan menurunnya kualitas kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

Permasalahannya adalah bagaimana karakteristik kemiskinan pada masyarakat sekitar hutan, sektor-sektor kehutanan apa yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kondisi kemiskinan masyarakat sekitar hutan. Tulisan ini merupakan ringkasan hasil studi yang dilaksanakan tahun 2005 tentang dampak kebijakan pembangunan kehutanan terhadap pendapatan masyarakat miskin di Kalimantan Timur.

Bila ditinjau dari cara pemanfaatannya, sumberdaya hutan selama ini, cenderung dimanfaatkan secara berlebihan yang berakibat pada kerusakan atau degradasi sumberdaya hutan itu sendiri. Eksploitasi sumberdaya hutan yang mengarah pada kerusakan hutan terutama disebabkan oleh sistem ekonomi yang berlaku sekarang mendorong perilaku orang-orang ke arah pemungutan rente hutan yang sebesar-besarnya untuk kepentingan individual. Pada banyak kasus, sumberdaya hutan lebih dianggap sebagai *common resources*, sehingga sumberdaya hutan kurang mendapat perhatian secara wajar dalam arti pemanfaatan untuk kepentingan individu lebih diutamakan daripada kepentingan kelestarian hutan itu sendiri, sehingga peran hutan sebagai sistem penyangga kehidupan (*life supporting system*) terabaikan.

## II. METODOLOGI

Studi ini merupakan hasil dari desk study review industry kehutanan dan studi lapangan di Kalimantan Timur.

Pemanfaatan sumber-sumber daya alam secara berlebihan tanpa memperhatikan aspek pelestariannya selama ini dengan sendirinya meningkatkan tekanan terhadap kualitas lingkungan hidup, yang pada akhirnya pasti akan mengancam kecukupan pangan dari penduduk, kondisi pemerataan distribusi pendapatan serta potensi pertumbuhan ekonomi mereka pada masa mendatang.

Pemanfaatan sumber daya hutan selama ini, ternyata tidak dinikmati secara proporsional oleh semua kelompok masyarakat. Kepentingan dan hak masyarakat yang berada di dalam dan sekitar hutan sering terabaikan, termasuk aksesnya terhadap manfaat hutan, sehingga memberikan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat tersebut. Hal ini menyebabkan kemiskinan tetap menjadi masalah walaupun pemanfaatan sumber daya alam termasuk hutan telah berlangsung lama.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Potret Kemiskinan di Kawasan Hutan

Diantara sektor kehutanan yang memberikan kontribusi terbesar pada tahun 1995 adalah kegiatan eksploitasi kayu hasil hutan alam dan diikuti oleh industri kayu lapis dan sejenisnya, yaitu 5.15% dan 4.70%, namun pada tahun 2003 menurun menjadi 2.24% dan 1.63%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Kalimantan Timur semakin menurun setelah otonomi daerah. Rata-rata pendapatan disposabel rumah tangga kehutanan pada tahun 1995 dan 2003 baik untuk golongan rendah, menengah, dan atas ternyata paling rendah dibandingkan dengan golongan rumah tangga lain.

Persentase penduduk miskin yang berada di daerah perkotaan Kalimantan Timur ternyata jauh lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten yang penduduknya umumnya tinggal di pedesaan dan dekat sumberdaya alam yang cukup melimpah. Sebagian besar wilayah pada kawasan hutan lindung ternyata penduduknya adalah masyarakat miskin, sedangkan pada kawasan hutan produksi dan areal penggunaan lain hanya sebagian kecil saja yang penduduknya miskin. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan perekonomian pada sektor kehutanan yang berkaitan dengan produksi kayu dan hasil hutan lainnya mampu mengurangi kemiskinan selama kegiatan produksi masih berlangsung, namun keberlanjutannya dalam jangka panjang masih dipertanyakan.

Kegiatan sektor kehutanan yang mempunyai pengaruh paling signifikan dalam memberikan pendapatan pada masyarakat miskin di Kalimantan Timur adalah industri barang-barang lainnya dari hasil hutan (industri kecil) dengan besaran multipliernya 0.0372, diikuti oleh industri bubur kertas dan kegiatan memproduksi kayu hasil hutan alam. Sedangkan yang mempunyai pengaruh paling kecil terhadap pendapatan rumah tangga kehutanan miskin adalah industri kayu gergajian dan pengawetan kayu, dan industri bahan bangunan dari kayu.

Lebih lanjut, rumah tangga kehutanan umumnya tidak banyak menikmati hasil dari kegiatan-kegiatan sektor kehutanan. Jika diambil rata-ratanya, besaran multiplier sektor kehutanan terhadap pendapatan rumah tangga kehutanan golongan rendah yang dapat disebut sebagai masyarakat miskin hanya sebesar 0.007. Dengan kata lain, setiap terjadi perubahan pendapatan pada sektor kehutanan sebesar 1 milyar rupiah, maka pendapatan dari masyarakat miskin kehutanan hanya meningkat 0.007 milyar rupiah atau 7 juta rupiah. Bila dibandingkan dengan rumah tangga lain seperti pertanian selain kehutanan dan bukan pertanian, maka rumah tangga kehutanan yang paling sedikit menikmati hasil kegiatan sektornya.

Skenario kebijakan pengurangan produksi tahunan hutan alam memberi dampak pada pengurangan pendapatan pekerja kehutanan sebesar 40.21%. Selanjutnya diikuti oleh skenario kebijakan larangan ekspor kayu bulat dengan perubahan sebesar 30.95%. Sedangkan terhadap pendapatan masyarakat miskin kehutanan (rumah tangga kehutanan golongan rendah) adalah sebesar 28.36% dan 21.88%. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat miskin di sekitar kawasan hutan masih sangat bergantung pada kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan alam yang dilakukan oleh pemegang HPH atau IUPHHK.

Lebih lanjut, skenario kebijakan transfer pengeluaran pemerintah (melalui Dana Reboisasi) untuk pembangunan hutan tanaman sebesar 20% mempunyai dampak pengganda pada peningkatan pendapatan masyarakat miskin kehutanan yang paling besar yaitu 1.37%.

Kondisi ini dapat dipahami, karena pengeluaran pemerintah melalui Dana Reboisasi selama ini digunakan terutama untuk membiayai kegiatan kehutanan di lapangan yang melibatkan masyarakat setempat secara langsung seperti pembangunan hutan tanaman dan rehabilitasi hutan dan lahan, sehingga masyarakat miskin dapat memperoleh manfaat secara langsung melalui keterlibatannya dalam kegiatan penanaman di lapangan.

Skenario kebijakan kehutanan yang memberi dampak peningkatan jumlah rumah tangga miskin di sekitar kawasan hutan tertinggi yaitu sebesar 53.64% adalah kebijakan pengurangan produksi tahunan hutan alam. Lebih lanjut, skenario kebijakan yang mengurangi jumlah penduduk miskin di sekitar kawasan hutan sebesar 1.82% diantaranya adalah kebijakan peningkatan kapasitas industri barang-barang lainnya dari hasil hutan dan kebijakan pengeluaran pemerintah untuk subsidi masyarakat. Sedangkan, skenario kebijakan pengurangan kapasitas industri gergajian, kebijakan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, dan kebijakan transfer pengeluaran pemerintah (melalui Dana Reboisasi) untuk pembangunan hutan tanaman, ternyata tidak memberi pengaruh terhadap perubahan jumlah penduduk miskin di sekitar kawasan hutan.

## **B. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan**

Berdasarkan kondisi di atas, maka pilihan-pilihan kebijakan pembangunan kehutanan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi lima isu kebijakan, yaitu :

### **1. Pengelolaan Kawasan Hutan**

Kondisi kawasan hutan alam yang semakin menurun kualitasnya memerlukan upaya rehabilitasi baik untuk hutan produksi alam maupun dengan melakukan perluasan hutan alam untuk konservasi, dengan melibatkan masyarakat miskin seoptimal mungkin. Upaya untuk mengembangkan potensi ekonomi hutan non-kayu seperti hasil hutan non-kayu dan jasa lingkungan perlu terus dilanjutkan secara lebih efektif, sekaligus mendorong perubahan pola produksi dan konsumsi yang mengarah pada penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan, sedangkan pemanfaatan untuk non-kehutanan agar memperhatikan nilai konservasi tinggi. Pengembangan potensi sumber daya non-kayu dapat diharapkan mengurangi tekanan terhadap sumber daya hutan, karena selama ini pengusahaan hasil hutan kayu dilakukan secara besar-besaran bahkan dengan cara yang ilegal. Disamping itu, pengembangan potensi komoditi tersebut, harus diimbangi dengan iklim pasar yang kondusif untuk memasarkan komoditi tersebut.

Dalam jangka panjang, perlu dikembangkan konsep hulu-hilir dalam pengelolaan hutan yang mempertimbangkan dampak pengelolaan hutan di daerah hulu terhadap daerah hilir dan mengintegrasikan pengelolaan kawasan konservasi dalam pembangunan pedesaan. Dengan menurunnya kualitas lingkungan termasuk air dan udara, maka telah dikembangkan mekanisme pembayaran jasa lingkungan untuk meningkatkan pendapatan pemilik sumber daya alam, seperti melalui pola pengurangan emisi karbon melalui mekanisme *carbon trading*. Upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin juga dapat dilakukan dengan mengikuti mekanisme seperti itu.

### **2. Industri Kehutanan**

Adanya gap antara kebutuhan industri dan produksi kayu, khususnya dari hutan alam, menyebabkan tekanan terhadap sumber daya hutan semakin kuat. Melalui restrukturisasi industri kehutanan dimaksudkan untuk menyeimbangkan pasokan bahan

baku kayu yang berasal dari pengelolaan hutan lestari dengan kapasitas industri kehutanan. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi industri yang tidak efisien dan industri yang menggunakan bahan baku ilegal. Strategi pengembangan industri kehutanan pada masa mendatang agar diarahkan pada industri skala kecil yang berbasis pedesaan. Mengingat industri kehutanan skala kecil ternyata mampu meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar hutan, maka untuk mendorong minat masyarakat mengembangkan industri tersebut dapat dilakukan dengan pemberian kemudahan prosedur investasi, keringanan pajak, subsidi tingkat bunga dan pemasaran produknya.

### 3. Pemberdayaan Fiskal

Pemanfaatan Dana Reboisasi untuk konservasi sumber daya hutan, diantaranya dapat digunakan untuk membiayai program pemerintah dalam rangka memperluas kawasan konservasi seperti perluasan Taman Nasional yang ada dan membentuk unit-unit kawasan konservasi yang baru. Selain itu, juga dapat digunakan untuk mengembangkan sistem insentif bagi masyarakat miskin yang mampu menjaga keberadaan sumber daya hutan dan lingkungannya, disamping untuk rehabilitasi ekosistem yang berbasis masyarakat. Pendapatan pemerintah dari kegiatan-kegiatan di sektor kehutanan seharusnya diinvestasikan kembali sepenuhnya untuk pembangunan sektor kehutanan, sehingga pengelolaan hutan lestari dapat dilaksanakan secara optimal. Selanjutnya, perlu dibuat kebijakan redistribusi dari pertumbuhan (*redistribution from growth*), yang merupakan upaya pemerintah untuk mengalihkan sebagian investasi dan tabungan tahunannya kepada masyarakat miskin secara bertahap melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan.

### 4. Penguatan Kelembagaan

Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat di sekitar hutan dapat dilakukan melalui pembentukan lembaga bisnis yang selain untuk meraih untung juga mampu melayani kebutuhan ekonomi sekaligus kebutuhan sosial masyarakat sebagai anggotanya. Kelembagaan bisnis yang dapat memadukan kekuatan masyarakat akan lebih efektif dan efisien karena dapat membuka akses kepada teknologi, modal, dan pasar daripada masyarakat melakukannya sendiri-sendiri. Kelembagaan seperti ini dapat berbentuk koperasi, asosiasi, yang membuat skala usaha menjadi lebih besar, penyerapan teknologi lebih cepat dan membuat aktifitas bisnisnya lebih efisien. Koperasi adalah kelembagaan usaha yang paling tepat dalam upaya mengentaskan kemiskinan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Koperasi-koperasi yang sudah umum keberadaannya, seperti Koperasi Tani Hutan, Koperasi Unit Desa, dan Koperasi Pondok Pesantren, dapat dimanfaatkan setelah sebelumnya dimodifikasi ke dalam bentuk koperasi asli. Penguatan lembaga pembiayaan/keuangan alternatif, terutama untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berada di sekitar kawasan hutan perlu didorong terus, karena lembaga seperti ini tidak hanya menyalurkan kredit modal kerja, tetapi juga membantu pembinaan koperasi dalam hal manajemen keuangan.

Struktur kelembagaan yang permanen diperlukan untuk menjaga keberlanjutan program bantuan teknis kehutanan untuk masyarakat di sekitar hutan. Peraturan perundangan tentang tenurial yang berpihak pada masyarakat miskin harus terus dimantapkan, karena kepemilikan aset pada sektor kehutanan bukan hanya tidak merata, tetapi juga terpusat pada kelompok tertentu, atau bahkan hanya pada segelintir orang saja. Sebagai contoh kepemilikan HPH dalam dekade belakangan ini sering terpusat pada

kelompok HPH yang dikuasai oleh pengusaha besar. Oleh karena itu, kebijakan mengurangi terpusatnya kepemilikan aset tersebut, yang disebut dengan kebijakan redistribusi (*redistribution policies*), diharapkan dapat memperbaiki distribusi pendapatan yang pada gilirannya dapat mengurangi kemiskinan. Dalam kebijakan ini termasuk juga reformasi hak pertanahan (*land reform*), yang bertujuan mengubah petani penggarap (buruh tani) atau penyewa tanah menjadi pemilik tanah. Kepemilikan tanah yang lebih luas dapat menjadi insentif yang besar untuk meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat miskin.

#### 5. Pembangunan Infrastruktur

Untuk membuka akses ke kawasan hutan untuk meningkatkan aktifitas perekonomian masyarakat khususnya yang tinggal di sekitar hutan, perlu dibangun infrastruktur yang memadai. Pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan ternyata tidak berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di sekitar hutan, karena tidak mempertimbangkan faktor-faktor utama yang mempengaruhinya, yaitu kepadatan penduduk, nilai-nilai konservasi, dan potensi ekonomi wilayah yang bersangkutan. Pembukaan akses ke kawasan konservasi untuk kegiatan ekonomi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut secara ketat. Disamping itu, tata ruang wilayah baik propinsi maupun kabupaten/kota hendaknya terintegrasi dengan pola tata ruang nasional, termasuk infrastruktur pendukungnya.

Pilihan-pilihan kebijakan kehutanan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan untuk dikembangkan pada masa mendatang agar difokuskan pada kebijakan-kebijakan yang terkait dengan (1) pengelolaan kawasan hutan, (2) industri kehutanan, (3) pemberdayaan fiskal, (4) penguatan kelembagaan, dan (5) pembangunan infrastruktur.

Pilihan-pilihan kebijakan tersebut diatas dikaitkan dengan kewenangan pemerintah daerah maupun pusat dalam jangka pendek dan menengah/panjang seperti Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 (Table 1). Pilihan kebijakan pembangunan kehutanan dalam penanggulangan kemiskinan (*Forestry development policies alternative to alleviate poverty*)

Isu Kebijakan	Pilihan Kebijakan				
	Jangka Pendek	Daerah	Pusat	Jangka Menengah/Panjang	Daerah
1	2	3	4	5	5
Pengelolaan Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan rehabilitasi hutan produksi alam</li> <li>Meningkatkan pemanfaatan hasil hutan non-kayu dan jasa lingkungan</li> <li>Melibatkan secara aktif masyarakat miskin dalam pengelolaan kawasan konservasi</li> <li>Memberikan insentif untuk masyarakat miskin yang melakukan konservasi hutan dan ekosistem, dan mencegah degradasi hutan</li> <li>Mengintensifkan kegiatan penanaman hutan yang melibatkan masyarakat miskin di sekitar kawasan hutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan produktivitas lahan hutan produksi alam</li> <li>Meningkatkan pemanfaatan hasil hutan non-kayu dan jasa lingkungan</li> <li>Melibatkan secara aktif masyarakat miskin dalam pengelolaan kawasan konservasi</li> <li>Memberikan insentif untuk masyarakat miskin yang melakukan konservasi hutan dan ekosistem, dan mencegah degradasi hutan</li> <li>Mengintensifkan kegiatan penanaman hutan yang melibatkan masyarakat miskin di sekitar kawasan hutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan konsep hulu-hilir dalam pengelolaan hutan</li> <li>Mengintegrasikan perencanaan kawasan konservasi dalam perencanaan wilayah dan tata ruang</li> <li>Mengembangkan skema pengurangan emisi karbon yang dapat mendorong masyarakat miskin untuk mendapat insentif bila mengelola hutan secara lestari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan kawasan hutan untuk tujuan non-kehutanan yang memperhatikan nilai konservasi tinggi</li> <li>Meningkatkan produktivitas usaha kehutanan masyarakat miskin</li> <li>Mengintegrasikan pengelolaan kawasan konservasi dalam pembangunan pedesaan</li> <li>Mengembangkan Kabupaten konservasi</li> </ul>	5

Tabel 1 (Table 1). Lanjutan (Continued)

	1	2	3	4	5
Industri Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan strategi implementasi program pengembangan industri kehutanan skala kecil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan diversifikasi produk yang bernilai tambah tinggi</li> <li>• Mengembangkan jaringan perdagangan hasil hutan di lapangan</li> <li>• Meningkatkan peran UMKM dan kemitraan masyarakat dengan sistem bagi hasil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk pengembangan industri kehutanan skala kecil</li> <li>• Menyeimbangkan produksi kayu dari hutan alam dan kebutuhan kayu untuk industri kehutanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memfasilitasi sertifikasi untuk produk hasil hutan yang berasal dari hutan rakyat</li> <li>• Meningkatkan pemasaran hasil hutan non-kayu dan jasa lingkungan</li> </ul>	
Pemberdayaan Fiskal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan Dana Reboisasi untuk konservasi sumber daya hutan</li> <li>• Menginvestasikan kembali pendapatan pemerintah dari kegiatan kehutanan ke sektor kehutanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan pengurangan pajak (<i>tax holiday</i>) untuk masyarakat yang dapat mencegah degradasi hutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengalihkan sebagian investasi dan tabungan pemerintah untuk program penanggulangan kemiskinan</li> <li>• Menerapkan (redistribusi pertumbuhan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan proporsi anggaran daerah untuk penanggulangan kemiskinan di sekitar kawasan hutan</li> <li>• Menerapkan mekanisme <i>debt for nature swap</i> (DNS) untuk kegiatan hutan kemasyarakatan</li> </ul>	



Tabel 1 (Table 1). Lanjutan (Continued)

1	2	3	4	5
Penguatan Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun peraturan perundangan tentang tenurial dan konservasi hutan yang berpihak pada masyarakat miskin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat sekitar hutan, seperti UMKM</li> <li>Mengembangkan sistem pendukung UMKM, yaitu sistem pendukung dana dan pendukung kelembagaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengurangi kepemilikan aset pada kelompok tertentu (redistribusi aset)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun struktur kelembagaan permanen untuk kegiatan asistensi kehutanan pada lembaga masyarakat lokal</li> <li>Meningkatkan akses pasar, modal dan teknologi kepada koperasi masyarakat sekitar hutan</li> </ul>
Pembangunan Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya di wilayah pedesaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuka akses kawasan konservasi untuk kegiatan ekonomi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengintegrasikan Tata Ruang Nasional dan Wilayah (Propinsi dan Kabupaten/Kota)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan infrastruktur untuk tujuan ekonomi dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk, nilai-nilai konservasi, dan potensi ekonomi</li> </ul>

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil-hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Persentase penduduk miskin yang berada di daerah perkotaan Kalimantan Timur ternyata jauh lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten yang penduduknya umumnya tinggal di pedesaan dan dekat sumberdaya alam yang cukup melimpah. Sebagian besar wilayah pada kawasan hutan lindung ternyata penduduknya adalah masyarakat miskin, sedangkan pada kawasan hutan produksi dan areal penggunaan lain hanya sebagian kecil saja yang penduduknya miskin. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan perekonomian pada sektor kehutanan yang berkaitan dengan produksi kayu dan hasil hutan lainnya mampu mengurangi kemiskinan.
2. Kegiatan sektor kehutanan yang mempunyai pengaruh paling signifikan dalam memberikan pendapatan pada masyarakat miskin di Kalimantan Timur adalah industri barang-barang lainnya dari hasil hutan, diikuti oleh industri bubur kertas dan kegiatan memproduksi kayu hasil hutan alam. Sedangkan yang mempunyai pengaruh paling kecil terhadap pendapatan rumah tangga kehutanan miskin adalah industri kayu gergajian dan pengawetan kayu, dan industri bahan bangunan dari kayu.
3. Rumah tangga kehutanan semua golongan terutama rumah tangga miskin ternyata tidak banyak menikmati hasil dari kegiatan-kegiatan sektor kehutanan, karena besaran multiplier sektor kehutanan terhadap pendapatan rumah tangga kehutanan golongan rendah sangat kecil dibandingkan dengan rumah tangga lain seperti rumah tangga pertanian selain kehutanan dan rumah tangga bukan pertanian.
4. Hasil simulasi skenario kebijakan pemerintah menunjukkan bahwa kebijakan pengurangan produksi tahunan hutan alam sebesar 50% memberi dampak yang paling besar pada pengurangan pendapatan pekerja kehutanan diikuti dengan kebijakan larangan ekspor kayu bulat. Pengurangan produksi dalam kegiatan pemanfaatan kayu dari hutan alam yang cukup drastis, sebenarnya tidak hanya menyebabkan pengurangan pendapatan pekerja tetapi juga mengurangi jumlah pekerja.
5. Industri skala kecil barang-barang dari kayu dan hasil hutan lainnya yang umumnya berada di pedesaan berpotensi besar untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat miskin bila dibandingkan dengan industri skala besar seperti kayu lapis, kayu gergajian, dan bubur kertas, disamping itu juga dapat mengurangi jumlah penduduk miskin yang hidup di sekitar hutan.

### B. Saran

Saran yang dapat disampaikan agar kebijakan pembangunan kehutanan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat miskin adalah :

1. Dampak pemanfaatan hutan yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat miskin akan direspon positif oleh masyarakat miskin tersebut yang kehidupannya sangat tergantung pada kelestarian sumber daya hutan, sehingga kebijakan pemanfaatan hutan yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat miskin di dalam dan sekitar hutan harus menjadi tujuan utama dalam optimalisasi pemanfaatan hutan.

2. Pemanfaatan hutan sebaiknya juga mempertimbangkan adanya imbang rugi (*trade off*) antara aspek ekonomi dengan aspek ekologi, seperti pendapatan devisa dengan kualitas lingkungan, sehingga pendekatan pengelolaan hutan yang berkelanjutan (*sustainable forest management*) dapat dikembangkan dengan mengharmonisasikan kedua aspek tersebut.
3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan harus diarahkan untuk meningkatkan akses pendanaan masyarakat (baik perbankan maupun lembaga keuangan alternatif lainnya), akses informasi pasar dan introduksi teknologi, akses pembinaan kelembagaan usaha masyarakat (seperti usaha mikro, kecil dan menengah/UMKM) serta aspek legal yang mendukung dan menjamin keterlibatan masyarakat dalam usaha pemanfaatan sumber daya hutan.
4. Desentralisasi sektor kehutanan seharusnya dilihat sebagai suatu hal yang positif dan merupakan upaya untuk membuat jasa pelayanan publik lebih dekat dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai implikasinya, pemberian ijin pemanfaatan hutan untuk tujuan produksi dapat dilimpahkan sebagian kepada pemerintah daerah, sedangkan untuk pengelolaan hutan konservasi tetap menjadi urusan pemerintah pusat namun memberi peluang kepada pemerintah daerah untuk mengelola kawasan konservasi yang terintegrasi dengan program konservasi nasional.
5. Pilihan-pilihan kebijakan kehutanan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan pada masa mendatang agar dilakukan dengan penyempurnaan kebijakan yang telah ada dan difokuskan pada kebijakan-kebijakan yang terkait dengan (1) pengelolaan kawasan hutan, (2) industri kehutanan, (3) pemberdayaan fiskal, (4) penguatan kelembagaan, dan (5) pembangunan infrastruktur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astana, A. dan Erwidodo. 2001. Pemberlakuan Kembali Kebijakan Larangan Ekspor Kayu Bulat. Laporan Proyek Penelitian Analisis Kebijakan Kehutanan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan Ekonomi Kehutanan, Bogor.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dan Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. 1997. Peran Sektor Kehutanan dalam Pembangunan Nasional dengan Pendekatan Model Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE). Laporan Akhir Penelitian. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dan Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2004. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Indonesia: Antara Krisis dan Peluang. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- Sumodiningrat, G. 2005. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan. Makalah disajikan pada Lokakarya Percepatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Sektor Kehutanan, 21 April 2005, Jakarta.
- Sunderlin, W.D. 1998. Between Danger and Opportunity: Indonesia's Forests in an Era of Economic Crisis and Political Change. CIFOR, Bogor.
- Sunderlin, W.D., I.A.P Resosudarmo, E. Rianto, and A. Angelsen. 2000. The Effect of Indonesia's Economic Crisis on Small Farmers and Natural Forest Cover in the Outer

- Islands. Occasional Paper 28(I). Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor.
- Suryahadi, A. and S. Sumarto. 2005. Poverty Analysis and Mainstreaming in Indonesia. SMERU Research Institute, Jakarta.
- Suryahadi, A., W. Widyanti, and S. Sumarto. 2003. Short-term Poverty Dynamics in Rural Indonesia During the Economic Crisis. *Journal of International Development*, 15:133-144.
- Sutomo, S. 1995. Kemiskinan dan Pembangunan Ekonomi Wilayah: Analisis Neraca Sosial Ekonomi. Disertasi Doktor. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.